

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Perkembangan harga barang dan jasa di Kota Gunungsitoli pada bulan Oktober 2021 secara umum menunjukkan adanya penurunan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Gunungsitoli bahwa Gunungsitoli pada Bulan Oktober 2021 mengalami deflasi sebesar 0,07 persen atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,08 pada bulan September 2021 menjadi 107,00 pada bulan Oktober 2021. Inflasi tahun kalender Kota Gunungsitoli selama Januari – Oktober 2021 deflasi sebesar 0,79 persen dan laju inflasi “year on year” (Oktober 2021 terhadap Oktober 2020) sebesar 1,22 persen. Harga Komoditi, Barang Strategis dan Barang Hasil Pertanian di Kabupaten Nias Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Nias (terlampir di bawah), perkembangan harga Kebutuhan Pokok dan Bahan Strategis Lainnya di beberapa kecamatan berbagai komoditas pada dari bulan Juli s/d bulan September 2021. Bulan Juli, bulan Agustus, bulan September) harga Kebutuhan Pokok dan Bahan Strategis Lainnya di Kabupaten Nias masih dianggap stabil/tetap. Komoditi Beras dari bulan Juli s/d bulan September harga tertinggi Rp. 8.000.-, namun tidak terpengaruh kepada masyarakat. Sementara dari bulan Juli s/d bulan September harga komoditi : Cabe Rawit Hijau, Cabe Merah Besar, Bawang Merah, Bawang Putih terjadi perubahan harga. Komoditi di atas terjadi perubahan harga oleh karena banyak faktor salah satunya cuaca yang sering berubah-ubah. Beberapa jenis komoditas bahan pokok dari hasil monitoring di sejumlah pekan/pasar di Kecamatan Kabupaten Nias dari bulan Juli sampai bulan September 2021 yang mengalami perubahan harga antara lain : Beras, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabe Merah, Cabe rawit, Gula Pasir, Minyak Goreng, Daging Lokal, Daging Ayam Broiler, Daging Ayam Kampung, Telur Ayam Broiler Sementara itu sejumlah komoditas yang harganya relatif stabil antara lain, Tepung Terigu, Telur Ayam Kampung, Susu Kental Manis, susu Dancow segala jenis Indomie, Kacang hijau, kacang tanah dan Ikan teri. Harga komoditi beras secara umum di atas cenderung fluktuatif dan menetap pada harga tertinggi Rp. 8.000,- dan dari bulan Juli s/d bulan September 2021 sedangkan harga terendah berada pada Rp.7.500,- dari bulan Januari s/d bulan Februari 2021. Harga komoditas Cabe Merah, Cabe Hijau, Bawang Merah dan Bawang Putih cenderung mengalami penurunan harga dan Komoditas Cabe Merah yang mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi mencapai harga Rp.54.000,-/kg cabe hijau, serta Rp.48.000,-/kg cabe merah. Gula Pasir di pada bulan Juli s/d bulan September mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.000.- harga dipengaruhi cuaca (penyaluran melalui kapal laut) dan harga terendah terjadi pada bulan September 2021 sebesar Rp. 13.500.-

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Nias Permasalahan inflasi dari kelompok volatile food. Pada kelompok volatile food, ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain yaitu : 1. Berdasarkan aspek produksi, pergudangan, distribusi, pembentukan harga, sumber daya, transportasi dan infrastruktur, dan pola pangan masyarakat. 2. Dominasi sisi penawaran lebih terasa dibandingkan sisi permintaan yang hanya bergejolak di musim-musim tertentu akibat pasokan yang tidak mencukupi. 3. Distribusi barang antar daerah membutuhkan biaya yang cukup tinggi. 4. Pasokan beberapa komoditas pertanian yang bersifat musiman seringkali melimpah ketika musim panen saja dan langka di waktu-waktu lainnya. 5. Belum adanya gudang penyimpanan hasil komoditas musiman.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kegiatan Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Dasar pelaksanaan kegiatan TPID di Kabupaten Nias pada Triwulan III, yaitu : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 027/1696/SJ Tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa Di Daerah dan Keputusan Bupati Nias Nomor 500/75/K/Tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kab. Nias T.A. 2021. Kegiatan koordinasi yang telah dilaksanakan baik ditingkat Daerah yaitu : Melaksanakan Rapat Koordinasi Kabupaten Nias Triwulan II Tahun 2021 pada hari Jumat, 23 Juli 2021, Peserta sesuai Keputusan Bupati Nias Nomor 500/75/K/Tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021, berjumlah 34 orang dari SKPD/instansi vertikal terkait, Narasumber : Muhammad Fajar Andrianto (Ka. BI Perwakilan Sibolga), Hiskia Harefa (Koordinator Fungsi Stat. Distribusi BPS Kab. Nias)

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kegiatan Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Nias Melakukan stabilisasi harga dan ketersediaan terhadap sejumlah bahan kebutuhan bagi masyarakat, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Nias melaksanakan koordinasi secara periodik ke Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara terkait sinkronisasi program serta melaporkan keadaan dan perkembangan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Nias. Pelaksanaan Program Kerja Triwulan III Tahun 2021 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Nias telah melaksanakan pertemuan untuk membahas program dalam rangka mengefektifkan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), strategi teknis pengendalian harga kebutuhan pokok bagi masyarakat dan beberapa program rencana aksi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nias selaku Ketua Harian Tim. Program Kerja Triwulan III Tahun 2021 Adapun rencana program kerja Tim Pengendalian Inflasi daerah (TPID) Kabupaten Nias Triwulan III 2021 adalah: 1. Pemantauan yang spesifik terhadap komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga yang signifikan. 2. Mendorong tercapainya target pelaksanaan program kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga anggota yang terkait dengan pengendalian inflasi daerah seperti operasi pasar, penyaluran beras sejahtera, peningkatan cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, pengembangan penanaman cabai dan sayur-sayuran.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Pengendalian Inflasi di Kabupaten Nias. Berdasarkan hasil pertemuan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi daerah pada hari Jumat, 23 Juli 2021 Triwulan III, dapat disimpulkan bahwasanya pada kelompok bahan makanan (volatile food) antara lain : 1. Mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah terutama dalam mendukung kelancaran produksi dan distribusi bahan pangan. 2. Mengintensifkan organisasi perangkat daerah terkait untuk terus meningkatkan ketahanan sandang dan pangan, meningkatkan sosialisasi kepada gapoktan tentang waktu masa tanam, masa panen, masa pemberian pupuk, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antara dinas terkait dengan penyuluh dan kelompok tani sebelum penerimaan pupuk bersubsidi serta penghimbauan pada Gapoktan untuk menjual hasil tanam melalui IT. 3. Mengintensifkan koordinasi dengan semua pihak terkait guna menjamin ketersediaan pasokan, produksi dan kelancaran distribusi kebutuhan bahan pangan pokok khususnya di Kabupaten Nias. 4. Mengelola ekspektasi masyarakat melalui proses komunikasi dan publikasi khususnya mengenai ketersediaan dan kesiapan pemerintah daerah dan juga ketersediaan sistem informasi yang memadai tentang harga yang berlaku dipasaran. 5. Meningkatkan pengawasan terhadap pungutan liar di jalur

distribusi, kondisi jalan yang tidak memadai, dan gangguan keamanan. 6. Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk merencanakan penyediaan gudang tempat penyimpanan bahan komoditi tertentu. 7. Perlu dukungan dan kerjasama semua pihak terkait, khusus dalam rangkaian pendistribusian bahan komoditi sampai ke masyarakat dgn baik. 8. Meningkatkan strategi 4K yakni keterjangkauan harga, ketersediaan stok, kelancaran distribusi dan komunikatif efektif. 9. Melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait penyesuaian harga komoditas strategis. Sementara Kelompok administered prices, inflasi dapat terjadi pada aspek regulasi, distribusi, sosialisasi, investasi, dan kelangkaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk meningkatkan : a. Sistem Ketahanan Pangan yang Kuat, b. Diversifikasi Pangan, dan c. Infrastruktur dan Transportasi yang terintegrasi.